

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN JEPANG DAN HUBUNGAN BILATERAL JEPANG – AMERIKA SERIKAT DALAM KERJASAMA EKONOMI

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan perekonomian Jepang dan hubungan bilateral Jepang-Amerika Serikat dalam kerjasama ekonomi sejarah negara Jepang.

A. Dinamika Politik & Ekonomi Jepang Pasca Perang Dunia II

Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, negara Jepang mengalami transisi dari negara yang awalnya kuat dalam bidang militer kemudian berusaha untuk mencari cara agar dapat menjaga pertumbuhan negaranya. Yang kemudian membawa Jepang berpindah haluan untuk fokus ke bidang ekonomi. Kekalahan yang dialami Jepang pada Perang Dunia II, membuat Jepang berada di bawah pendudukan tentara sekutu Amerika Serikat selama kurang lebih 7 tahun. Di mana Jepang tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan militernya lagi, dan kemudian membawa Jepang pada jaminan perlindungan dari ancaman negara lain yang tertuang dalam *Treaty Of Mutual Cooperation and Security* pada tahun 1960. Sehingga pada masa pendudukan Amerika Serikat, Jepang mencurahkan perhatiannya untuk tidak terus bergantung terhadap perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan dengan kerja keras yang sungguh-sungguh, di antaranya melalui usaha-usaha pengembangan sektor-sektor ekonomi Jepang untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Jepang.

1. Kondisi Jepang Pasca Perang Dunia II

Pada era 1950-an, ekonomi Jepang mengalami kemajuan yang pesat. Lebih dari sepuluh tahun setelah itu, rata-rata tingkat pertumbuhan mencapai kurang lebih 10%. Hal ini adalah suatu rekor yang tidak pernah disamai oleh negara besar mana pun (Reischauer, 1982). Jepang menjadi negara yang benar-benar makmur dari hasil kemajuan dalam bidang perekonomian. Orang Jepang dilanda semangat konsumerisme yang tinggi. Pertumbuhan dalam *Gross National Product* (GNP) per kapita dibantu oleh stabilnya jumlah angka kelahiran yang diperkirakan tingkat kelahirannya kurang lebih satu persen per tahun. Pada tahun 1946, Jepang menitikberatkan pada pemulihan ekonomi dan politik. Pembaharuan yang dilaksanakan oleh Jepang ini mencakup orientasi pembangunan di bidang ekonomi dan pertahanan dalam taraf yang minimum. Kemudian memunculkan pelaksanaan Doktrin Yoshida. Doktrin ini diimplementasikan dalam pembangunan industri sesuai dengan kebutuhan pasar global dan kebijakan luar negeri yang cinta damai dengan negara-negara lain. Doktrin Yoshida tetap dipertahankan sampai pada tahun 1964 sebagai acuan dalam pembangunan negara Jepang. Pada tahun 1960-1965, Jepang memasuki periode pertumbuhan yang pesat. Infrastruktur ekonomi secara aktif mulai dikembangkan untuk mendukung industri yang dijalankan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap keseimbangan dalam sistem pemerintahan Jepang (Reischauer, 1990).

Pada tahun 1960-an, jumlah penduduk Jepang sekitar 94 juta jiwa. Anjuran pembatasan kelahiran secara umum dan aturan yang longgar dalam hal aborsi, membantu menekan jumlah kelahiran pertahunnya. Keluarga yang tinggal di kota-kota besar umumnya hanya memiliki dua anak, karena hal ini disadari oleh orang Jepang bahwa mereka tinggal di apartemen-apartemen kecil yang jumlah ruangnya sangat terbatas. Walaupun jumlah penduduk kota makin bertambah

karena adanya urbanisasi dari desa ke kota, tetapi tingkat kejahatan di Jepang tetap rendah. Hampir semua keluarga Jepang mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat universitas. Persentase kelompok usia yang menyelesaikan dua belas tahun tepat untuk lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), naik menjadi sekitar 90%, hal ini merupakan suatu rekor dunia. Lebih 30% dari kelompok usia itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini melebihi persentase di Negara-negara Eropa Barat (Reischauer, 1982).

Pada awal tahun 1970-an, Jepang menjadi *partner* perdagangan yang pertama atau paling tidak nomor dua terbesar di seluruh dunia. Jepang kini mulai menanamkan investasi besar-besaran di berbagai negara, termasuk di negara yang sudah maju. Bantuannya menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang, dan partisipasinya dalam badan-badan internasional merupakan hal yang sangat berarti bagi semua anggotanya.

	1982	1983	1984	1985	1986
Amerika Serikat	-2,5	3,6	6,8	3,0	2,9
Jepang	3,1	3,2	5,1	4,7	2,4
Jerman Barat	-1,0	1,9	3,3	2,0	2,5
Perancis	2,5	0,7	1,4	1,7	2,0
Inggris	1,5	3,3	2,7	3,6	3,3
Italia	0,2	0,5	3,5	2,7	2,7
Kanada	-3,2	3,2	6,3	4,3	3,3

Sumber : Kedutaan Besar Jepang, 1989, hal.51.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) negara-negara maju yang ada

di tabel dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Namun untuk negara Jepang sendiri pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) negaranya terlihat stabil dan tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Jepang merupakan negara yang dulunya kuat dalam bidang militer. Namun, karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Jepang pun merubah haluannya ke bidang ekonomi. Pasca Perang Dunia II, perlahan-lahan Jepang bangkit dari keterpurukannya dan fokus membangun negaranya. Adapun perkembangan perekonomian Jepang bisa dibagi menjadi beberapa periodisasi.

2. Pertumbuhan Ekonomi Jepang Pasca Perang Dunia II

Usai kekalahan Perang Dunia II, Jepang mengalami kemerosotan tajam. Membawa dampak negatif, kerugian finansial, bahkan hilangnya nyawa. Akibat dari kekalahan tersebut, kerugian tercermin dari angka inflasi yang tinggi hingga lebih dari 100%, terjadinya kelangkaan akan produk konsumsi, serta produktivitas ekonomi yang sangat rendah. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Jepang melakukan beberapa regulasi, antara lain pengawasan langsung terhadap aktivitas produksi, pemantauan terhadap stabilitas harga, serta pemberian subsidi untuk menggerakkan sektor. Selain itu, percetakan uang baru juga dilakukan untuk mendorong transaksi perdagangan pasca Perang Dunia II (Ochno, 2016).

Pada bulan Maret 1949, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan “*Dodge Line*”. Kebijakan ini diperkenalkan oleh seorang ekonom asal Amerika Serikat, Joseph Morrell Dodge, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian Jepang. Kebijakan ini berupa penyeimbangan anggaran negara untuk mengurangi defisit, pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih efisien, pengurangan intervensi pemerintah terhadap aktivitas

perekonomian, penghentian pinjaman yang tidak tepat sasaran, serta pematokan nilai tukar mata uang *Yen* Jepang (¥) terhadap US\$ diangka ¥360 (US\$1=¥ 360). Untuk melihat bagaimana perkembangan era Jepang, dapat dilihat dari 4 periode yang akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Era Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (tahun 1950-an sampai dengan awal 1970-an)

Pada era pertumbuhan ekonomi Jepang tahun 1950-1970an, terdapat beberapa kebijakan yang mencerminkan situasi politik negara Jepang. Salah satu kebijakannya, yaitu Doktrin Yoshida. Pasca Perang Dunia II, politik luar negeri Jepang terhadap Asia lebih banyak ditentukan oleh kepentingan ekonomi Jepang, politik luar negeri Jepang ditentukan secara langsung dan tidak langsung oleh pemikiran-pemikiran dasar dari Perdana Menteri Shigeru Yoshida (1946-1954) (Irsan, 2005). Doktrin tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati.

Doktrin Yoshida ditujukan untuk meningkatkan perekonomian negara Jepang, dengan tetap mempertahankan sistem pertahanan dan keamanan Jepang yang tidak diperbolehkan mempunyai militer sesuai dengan undang-undang. Sehingga dengan demikian, kekuatan ekonomilah yang menjadi peran penting bagi negara Jepang. Amerika mendorong Jepang untuk ikut serta dalam perjanjian keamanan kolektif di Asia sebagian dari strategi Amerika selama Perang Dingin. Namun, Yoshida menolak ajakan tersebut karena tidak sejalan dengan tema sentral politik luar negeri Jepang pasca Perang Dunia II yang berfokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri (Irsan, 2005). Setiap Amerika mengajak Jepang untuk terlibat dalam perjanjian keamanan, Yoshida akan kembali ke Pasal 9 Konstitusi Jepang yang melarang Jepang menjadikan perang sebagai politik luar negerinya (Pyle, 2019). Sepanjang tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an, Jepang mulai mengalirkan

bantuan ekonomi ke Asia Tenggara. Di samping upaya Jepang memberikan kompensasi bagi negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang. Tetapi Jepang juga mempersiapkan Asia Tenggara sebagai salah satu pasar bagi ekspor barang-barang yang diproduksinya (Vogel, 2019).

Pada periode 1950'an hingga awal 1970'an, merupakan periode emas perekonomian Jepang, di mana angka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai lebih dari 10%. Pada era ini, perekonomian Jepang dikenal dengan istilah "*miracle economy*". Setelah pelaksanaan *Dodgley Line*, pemerintah Jepang terus melakukan reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor (di antaranya sektor industri dan pertanian), peningkatan taraf hidup dan hak-hak tenaga kerja, penerapan kebijakan ekonomi yang ekspansif, serta pengembangan teknologi dan industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas perekonomian (Yoshioka, et.al, 2018).

Pada tahun 1960-an, kehidupan ekonomi keluarga kelas menengah di Jepang mulai membaik. Semakin banyak keluarga di Jepang yang memiliki televisi, mesin cuci, lemari pendingin, dan mobil pribadi. Tiga hal pertama menjadi lambang keluarga kelas menengah Jepang. Banyak keluarga yang tinggal di blok-blok apartemen sewa yang ada di Jepang. Pada era 1960-an, PDB Jepang meningkat dari US\$44,31 miliar dengan pendapatan per kapita US\$479 pada 1960 menjadi US\$172,2 miliar dengan pendapatan per kapita US\$1.669,1 pada 1969. Meskipun demikian, Jepang juga menghadapi masalah, seperti ketergantungan terhadap impor energi, pencemaran lingkungan, dan kepadatan penduduk.

Salah satu perjanjian yang dibuat pada tanggal 8 September 1951, yaitu Perjanjian San Fransisco yang kemudian disahkan dan pada tanggal 28 April 1952. Perjanjian ini mulai berlaku efektif sekaligus memulihkan kembali kedaulatan Jepang. Pada tahun 1954, angkatan bersenjata

Jepang dibentuk kembali, kali ini sebagai pasukan bela diri dan hanya untuk keperluan defensif, dan pada tahun 1956, Jepang bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemulihan ekonomi Jepang juga diikuti dengan derasnya arus masuk pengaruh kebudayaan Amerika ke Jepang. Produk-produk kebudayaan populer Amerika, seperti komik, film, serial televisi, dan musik masuk ke Jepang dengan cepat dan diminati oleh masyarakat Jepang.

b. Era *Oil Shock*, *Economic Booming*, dan *Bubble Economy* (1970-an hingga akhir 1980-an)

Era tahun 1970-an, Jepang sebagai pemain utama dalam ekonomi global memunculkan kekhawatiran di antara negara-negara Asia Tenggara mengenai peranan Jepang. Jepang muncul sebagai kekuatan ekonomi raksasa yang dikhawatirkan sebagai kekuatan ekonomi yang eksploitatif. Namun, Jepang berusaha untuk menghapus anggapan negative tersebut melalui aliran besar program-program bantuan (Green, 2003). Pada tahun 1977, Perdana Menteri Fukuda Takeo berusaha untuk memperluas hubungan politik dengan negara-negara Asia Tenggara saat perayaan ulang tahun ASEAN ke – 10 (Green, 2003). Fukuda memfokuskan pada ASEAN dan pada tema integrasi regional di Asia Tenggara, di mana ia menetapkan sebuah *Japan – ASEAN Forum For Economic Dialogue* serta menawarkan bantuan sebesar US\$1,5 miliar. Yang kemudian memunculkan inisiatif besar kebijakan luar negeri Jepang oleh Perdana Menteri Takeo Fukuda yaitu Doktrin Fukuda. Terdapat prinsip-prinsip dasar hubungan Jepang-Asia Tenggara yang terdiri dari 3 aspek (Sueo, 1992, hal.) yaitu:

- 1) Jepang akan menjauhi peran sebagai kekuatan militer regional.
- 2) Jepang akan memperkuat ikatan dengan negara-negara Asia Tenggara (*Heart to Heart Diplomacy*)

- 3) Jepang akan berusaha mencari cara untuk menjembatani kesenjangan antara ASEAN dan Indocina

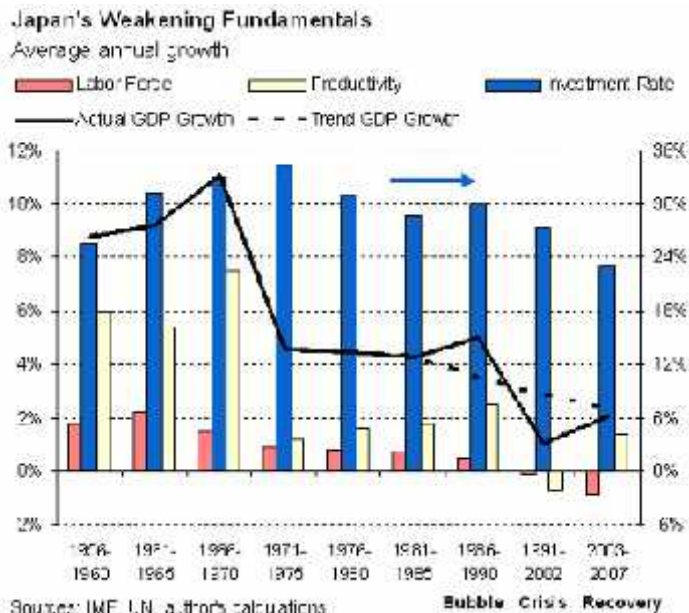
Pada awal 1980-an, perekonomian Jepang mengalami kemajuan pesat (*booming economy*), yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga (*household consumption*), tingginya laba sektor swasta, semakin banyaknya tenaga kerja terdidik dan terampil (*educated and skilled labor*), stabilnya situasi politik dalam negeri, meningkatnya investasi di sektor industri, serta semakin besarnya peran teknologi dan inovasi dalam perekonomian. Akan tetapi, pencapaian di atas membuat aktivitas ekonomi Jepang menjadi kurang terkontrol, salah satu contohnya sektor perbankan yang terlalu mudah memberikan kredit (terutama di sektor properti). Akhirnya pada tahun 1989, perekonomian Jepang memasuki fase gelombang ekonomi (*bubble economy*), di mana harga properti meningkat terlalu tajam dengan diikuti kenaikan harga saham yang terlalu tinggi (*over-valued*), serta pembangunan infrastruktur pedesaan yang massif karena anggaran yang digunakan terlalu besar tanpa adanya pertimbangan (Bureau, 2016).

- c. Pecahnya Gelembung Ekonomi (*Bubble Burst*) dan Dekade Yang Hilang (awal 1990-an hingga awal 2000-an)

Pada periode awal 1990-an hingga awal 2000-an, Jepang mengalami stagnasi perekonomian akibat sistem keuangan yang tidak stabil, serta buruknya kredibilitas perbankan yang jadi pemicu *economic bubble*. Ditandai dengan melonjaknya kredit macet perbankan (*non-performing loan*) di sektor properti dan merosotnya nilai saham hingga 50% di bursa Tokyo *Stock Exchange*. Bukan hanya itu saja, banyak perusahaan Jepang yang mengalami penurunan kapasitas produksi, peningkatan jumlah utang, serta kelebihan jumlah tenaga kerja. Pecahnya gelombang ekonomi (*bubble*

burst) membawa ekonomi Jepang masuk ke dalam resesi yang berkepanjangan.

Guna menstabilkan perekonomian Jepang pada masa ini, ada berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan, salah satunya *The Bank of Japan* (Bank Sentral Jepang). Bank tersebut melakukan pencetakan mata uang untuk mendorong stabilitas finansial, sementara pemerintah mengambil kebijakan untuk menekan munculnya kredit macet yang lebih besar. Tetapi keadaan semakin memburuk akibat terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia pada tahun 1977-1998. Sehingga pada dekade 1990-an, merupakan era gelap perekonomian Jepang atau disebut sebagai sebuah dekade yang hilang (*the lost decade*) (IMF, 2000). Studi menjelaskan bahwa kurangnya keterbukaan informasi keuangan (*financial disclosure*) dan transparansi laporan keuangan, membuat sistem keuangan di Jepang rentan terhadap timbulnya persoalan. Di samping itu, tidak ada manajemen risiko (*risk management*) di sektor perbankan, sistem perbankan yang cenderung tertutup, serta kebijakan moneter yang tidak tepat sasaran, diyakini menjadi penyebab awal munculnya *bubble economy* (Urike, 1996).



Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jepang

Sumber: IMF, 2010

Dari grafik tersebut, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun 1956 hingga tahun 1990-an meningkat cukup drastis dan stabil. Akan tetapi, pada tahun 1991 hingga 2002, tingkat investasi menurun sekitar kurang lebih 3 persen, sedangkan angka angkatan kerja dan produktivitas mencapai di bawah 0%. Pada tahun 2003 hingga 2007, angka investasi menurun juga dengan angka penurunan mencapai 5%. Akan tetapi, pada tahun 2003 jumlah produktivitas meningkat grafiknya menjadi di atas nol persen atau tepatnya 5%. Sedangkan angka jumlah angkatan kerja semakin menurun dengan angka di bawah 0% sebanyak -3% yang berarti menurun 2% dari angka sebelumnya yaitu -1%.

d. Era Pemulihan Ekonomi dan Kebijakan Abenomics
(*Three-Arrows Policy*) (awal 2000-an hingga sekarang)

Pemerintah Jepang melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ekonomi, antara lain dengan melakukan reformasi kebijakan makro ekonomi dan restrukturisasi institusi keuangan. Dengan beberapa kebijakan ekonomi yang diambil antara lain menghapus kredit macet, mengurangi devisa anggaran, serta melakukan privatisasi perusahaan negara. Namun, hutang yang ada pada saat itu masih sangat besar, yaitu mencapai 160% dari total *Gross Domestic Product* (GDP). Bukan hanya itu, pada tahun 2011 terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami di pantai laut Jepang yang disertai dengan bocornya instalasi nuklir.

Kemudian pada bulan Januari 2013, di kepemimpinan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan *Three-Arrows Policy* atau lebih dikenal dengan istilah *Abenomics*. Kebijakan ini antara lain kebijakan moneter yang longgar (*expansionary monetary-policy*), di antaranya melalui pemberian kualitatif-kuantitatif asing, kebijakan fiskal yang fleksibel, di antaranya berupa stimulasi fiskal dan penetapan tarif pajak serta reformasi struktural, misalnya kebijakan tentang ketenagakerjaan. Pemerintah Jepang mengklaim bahwa penerapan kebijakan *Abenomics* mampu membawa dampak positif, antara lain berupa peningkatan pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) nominal sekitar ¥37 Triliun selama periode 2012-2015, serta penurunan angka pengangguran dari 4,3% menjadi 3,1% di periode 2012-2016. Kebijakan ini telah dilaksanakan secara efektif, terkait dengan restrukturisasi dan reformasi di sektor energi, kesehatan, serta pertanian. Pemerintah Jepang juga secara aktif mengembangkan sektor usaha kecil (*small-medium enterprises*) (JPO Japan, 2017).

Perdana Menteri Shinzo Abe membagi kebijakannya menjadi 2, yaitu ekonomi dan militer. Ekonomi dibagi menjadi

3 hal, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural. Dalam kebijakan moneter, pada bulan Januari 2013 pemerintah dan Bank of Japan melakukan perjanjian kerja sama yang disebut paket stabilitas harga (*price stability target*) untuk mencapai target inflasi sebesar 2%. Kemudian pada kebijakan fiskal yang fleksibel, pemerintah Jepang mengeluarkan paket stimulus ekonomi dengan buget sebesar 10 triliun yen. Sebesar 3,8 triliun Yen digunakan untuk rekonstruksi Tohoku dan berbagai pemulihan bencana. Sedangkan sebesar 3,1 triliun Yen digunakan untuk promosi dai sektor swasta dan inovasi. Dan yang terakhir yaitu reformasi structural, yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mendorong korporasi yang ada di negara tersebut untuk lebih gencar melakukan investasi. Hal ini karena saat ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk menanamkan modal, menyusul munculnya optimisme pasar dan melemahnya nilai tukar yen (Sanusi, 2013).

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden China Xi Jinping sepakat untuk melakukan pertemuan bilateral kedua negara disela-sela pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang diselenggarakan di Beijing bulan November. Jepang mempunyai kepentingan dalam ekonomi, yaitu agar Jepang bisa dengan mudah masuk ke dalam pasar China untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi yang memberikan efek jangka panjang terhadap ekonomi Jepang (Diplomats, 2014). Perdana Menteri Shinzo Abe juga meningkatkan pertahanan Jepang dengan meningkatkan keterbukaan perekonomian di kawasan Asia Pasifik, serta bekerjasama dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (Ayu, 2015).

B. Hubungan Kerja Sama Jepang & Amerika Pasca Perang Dunia II

Pasca Perang Dunia II, Jepang harus berupaya untuk memperbaiki kehancuran yang dialaminya akibat perang,

mulai dari upaya membenahi bidang ekonomi sampai pada bidang politik. Upaya yang dilakukan Jepang tidak lepas dari hubungan kerjasama Jepang-Amerika dalam bidang politik. Karena dalam hal ini, politik dalam negeri Jepang tidak dapat dipisahkan dari campur tangan Amerika Serikat. Sesuai dengan isi perjanjian San Fransisco tanggal 8 September 1951, di mana Amerika Serikat masih tetap menduduki wilayah Jepang dengan alasan melindungi dari ancaman pihak luar (Stockwin, 1984). Lahirnya aliansi dengan Amerika Serikat menyebabkan munculnya efek negatif dari politik luar negeri Jepang. Karena Jepang harus mengikuti bagaimana tata aturan Amerika dalam perjanjian pertahanan antar kedua negara tersebut. Beberapa efek negatif yang timbul dikarenakan negara-negara yang kurang suka adanya aliansi Jepang dan Amerika. Namun pada tahun 1953, Jepang mulai menjalin hubungannya dengan negara-negara lain dan mulai membangun kembali perdagangan dengan Republik Rakyat Cina (RRC), meskipun pada tingkat yang rendah (Hall, 1962). Jepang juga mulai mengembangkan perdagangan dengan Taiwan.

1. Hubungan Kerjasama Politik Jepang-Amerika

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II berdampak pada perubahan kondisi ekonomi yang hancur dan struktur sosial politik yang juga mengalami perubahan. Perpolitikan Jepang menciptakan politik akomodasi yang menguntungkan bagi pemerintah Jepang modern. Politik akomodasi berisi tindakan penggabungan berbagai elemen politik yang terdapat dalam partai-partai politik di Jepang. Politik akomodasi ini dilaksanakan oleh partai-partai besar seperti Partai Liberal, Partai Demokrat, dan Partai Sosialis. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan kondisi politik Jepang yang mengalami ketegangan akibat hubungan Amerika dan Jepang dalam bentuk perjanjian pertahanan tahun 1959 dan disepakati 1960. Kondisi politik Jepang pada tahun 1960 mengalami ketenangan dan gangguan dalam keseimbangan pemerintah.

Suara dari partai Liberal Demokrat (LDP) masih menjadi kunci dalam sistem pemerintahan Jepang. Partai Liberal Demokrat (LDP) berusaha untuk memenangkan dukungan dari golongan oposisi dengan menekankan kebijakan pertumbuhan ekonomi Jepang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Jepang (Stockwin, 1984).

Hubungan perpolitikan Jepang-Amerika pada tahun 1960 ditandai dengan terjadinya penandatanganan *Treaty of Mutual Cooperation and Security*. Yang mencakup empat hal pokok yang menjadi dasar pemikiran perjanjian keamanan yaitu (Nisihihara, 1991):

- 1) Jepang-Amerika menyadari keberadaan ancaman militer bersama.
- 2) Jepang-Amerika mempertimbangkan untuk kerjasama dalam keamanan.
- 3) Jepang-Amerika memandang bahwa kebebasan politik & ekonomi harus dilindungi.
- 4) Untuk mendukung pandangan ini Jepang-Amerika setuju agar Amerika menanggung kewajiban untuk melindungi keamanan Jepang dan Kawasan Timur.

Kemudian di tahun 1968, sesuai dengan Pasal 3 dari perjanjian damai, yaitu mengembalikan wilayah Jepang yang dikuasai Amerika Serikat dalam perang. Bulan Juni Amerika Serikat mengembalikan kepulauan Bonin (termasuk Iwo Jima) kepada pemerintah Jepang. Pada tahun 1976, Amerika Serikat dan Jepang secara resmi mendirikan sebuah subkomite untuk kerjasama dalam bidang pertahanan. Kemudian pada tahun 1981, sebagai jawaban atas permintaan Amerika Serikat, Jepang menerima tanggung jawab yang lebih besar untuk pertahanan laut. Yaitu berjanji untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada pasukan Amerika Serikat di Jepang, dan lebih memperkuat pasukan bela diri.

2. Hubungan Kerjasama Ekonomi Jepang dan Amerika

Pertumbuhan ekonomi Jepang memperlihatkan keberhasilan pada periode kebangkitan nasional yang terjadi pada tahun 1960. Hasil yang dicapai Jepang pada masa kebangkitannya adalah Jepang bergabung dengan kelompok negara-negara industri utama dalam organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 1964 (Soesastro, 1990). Olimpiade ke-18 yang diadakan di Tokyo pada bulan Oktober 1964, memberikan kejelasan bahwa status Jepang telah kembali menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara lain. Jepang menyebut tahun 1964 sebagai tahun keemasan atau '*golden years*'. Hasil yang menjadikan Jepang sebagai negara yang memiliki perekonomian luar biasa.

Sebuah contoh yang spesifik dari kerjasama yang begitu dekat antara Jepang dan Amerika Serikat adalah saat Jepang dengan cepat menanggapi panggilan dari Amerika Serikat yang meminta bantuan lebih besar untuk pasukannya yang berada di Jepang, menyusul perubahan nilai tukar mata uang Jepang-Amerika Serikat yang terjadi dengan cepat pada pertengahan tahun 1980-an. Perubahan nilai tukar mata uang tersebut memberikan kerugian bagi Amerika Serikat di Jepang (Bauschard, 2018). Atas permintaan Amerika Serikat, Jepang menyanggupi untuk menutup kerugian tersebut. Contoh lainnya, yaitu kesediaan Jepang menanggapi permintaan Amerika Serikat untuk memberi bantuan luar negeri kepada negara-negara yang dianggap strategis dan penting untuk negara barat. Selama tahun 1980-an, pejabat-pejabat Amerika Serikat memberikan apresiasi atas bantuan yang Jepang berikan kepada negara Pakistan, Turki, Mesir, dan Jamaika.

Reformasi perpolitikan dan perekonomian Jepang yang terjadi setelah adanya Reformasi Meiji dan kebangkitan Jepang pasca kekalahan di Perang Dunia II telah membawa Jepang menjadi salah satu kekuatan dunia yang baru. Hal ini

terlihat dengan semakin aktifnya Jepang dalam kancan hubungan internasional. Keaktifan Jepang ini tercermin dengan masuknya Jepang ke dalam beberapa organisasi internasional seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan The Group of Twenty (G20). Selain itu juga turut aktif menjaga perdamaian dengan beberapa kali masuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam hubungan bilateralnya, Jepang juga telah melakukan banyak kerjasama dengan negara lain yang berhubungan dengan berbagai bidang. Jepang memiliki hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan AS, dan menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan pakta keamanan Jepang-AS (Triharso, 2019).

Salah satu keberhasilan Jepang bekerjasama dengan Amerika, yaitu meningkatkan pertumbuhannya melalui bidang industri. Hal ini karena Jepang menyadari bahwa hal utama yang harus terlebih dahulu dilakukan paska kalah dalam perang adalah meningkatkan perekonomian. Strategi Jepang untuk bangkit di antaranya membuka diri untuk bekerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan Jepang telah berimplikasi terutama dalam bidang industri. Hal ini dilihat dari kemajuan teknologi berupa teknologi informasi dan komunikasi yang banyak diminati di masyarakat baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Produk-produk Jepang mulai merajai dunia internasional dan bahkan dapat bersaing dengan produk-produk industri yang ada di negara maju. Setelah berakhirnya perang, terlihat hubungan antara Jepang-Amerika Serikat mengarah ke hal yang lebih baik. Kerjasama yang dibangun melalui faktor ekonomi pun memberikan surplus dari US\$ 380 juta pada tahun 1970-an menjadi hampir US\$ 48 miliar pada tahun 1988 tak hanya bagi Jepang. Amerika Serikat pun mendapatkan surplus US\$10 miliar pada tahun 1980, meningkat hingga US\$ 37,7 miliar pada tahun 1990 (Triharso, 2019).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekalahan Jepang pasca Perang Dunia II membuat Jepang mengalami transisi yang dulunya kuat dalam bidang militer kemudian berpindah ke bidang ekonomi. Yang mana blok-blok kerjasama perdagangan atau pasar bebas menjadi alternatif strategis bagi Jepang dan Amerika untuk mencapai kepentingan ekonomi